

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Terorisme telah lama menjadi ancaman di Indonesia, namun dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, kekerasan ekstremisme yang mengarah pada terorisme semakin kompleks. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia, yang dimulai oleh aksi Dian Yulia Novi dalam aksi “bom panci”. Dian Novi Yanti yang disetir oleh kelompok teroris ISIS menjadi indikator bahwa tren tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan dalam menjadi tren global dan menuntut respons yang lebih spesifik dan terstruktur dari pemerintah Indonesia.

Pada tahun 2016, Indonesia masih menggunakan UU Nomor 15 Tahun 2003 sebagai panduan utama dalam respon terhadap penyebaran ekstremisme kekerasan di Indonesia. UU Nomor 15 Tahun 2003 yang masih kental dengan pendekatan keamanannya terfokus terhadap respon setelah terjadinya kejahatan terorisme dan bukan langkah pencegahan seperti di revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 yaitu UU Nomor 5 Tahun 2018. Berkat adanya UU Nomor 5 Tahun 2018, BNPT sebagai lembaga utama dalam pencegahan terorisme di Indonesia dapat merespon tantangan ini dengan pendekatan pentahelix, yang melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintahan, akademisi, media, sektor bisnis, organisasi, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, BNPT dapat bermitra dengan berbagai pihak, seperti UN Women, yang dapat membantu BNPT dalam proses pengintegrasian perspektif gender dalam strategi pencegahan ekstremisme kekerasan di Indonesia.

Kerja sama BNPT dan UN Women dimulai pada tahun 2018 dalam tahap perancangan RAN PE. Dalam tahap perancangan RAN PE, BNPT yang memang ingin memasukkan aspek gender dalam pencegahan penyebaran ekstremisme kekerasan dan UN Women yang mendasari *triple mandate* memungkinkan integrasi

Steven Andrew Washita, 2025

KERJA SAMA BADAN PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) DAN UNITED NATIONS (UN) WOMEN DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN EKSTREMISME KEKERASAN DI INDONESIA 2018-2024

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

aspek pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai strategi utama dalam mencegah ekstremisme kekerasan perempuan di Indonesia. UN Women membawa keahliannya dalam pemahaman perspektif gender ke dalam RAN PE melalui sumbangsih pikiran di konsultasi publik dan konsultasi kementerian lembaga. Dalam implementasi RAN PE, baik UN Women maupun BNPT berusaha untuk menggunakan pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal. Contoh implementasi RAN PE oleh BNPT dan UN Women dengan konteks lokal untuk menghindari konotasi negatif, BNPT dan UN Women mempromosikan narasi positif seperti perdamaian dan toleransi, bukan fokus pada isu-isu ekstremisme secara langsung. Di atas kertas, kerja sama antara BNPT dan UN Women membuahkan hasil yang memuaskan dengan 130 banyaknya aksi yang tertulis di RAN PE, terdapat 11 aksi yang terkait dengan perempuan. Sudah terdapat prinsip-prinsip integrasi perspektif perempuan dan pemberdayaan kelompok rentan terhadap aksi-aksi tersebut yang sesuai dengan teori keamanan feminisme.

Kerja sama BNPT dan UN Women dalam publikasi “Analisis Gender tentang Ekstremisme Kekerasan dan Dampak COVID-19 terhadap Perdamaian dan Keamanan di ASEAN” dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi tren ekstremisme kekerasan yang berbasis gender di Asia Tenggara dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan kohesi sosial di kawasan ASEAN. Dengan adanya RAN PE, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi contoh baik diikuti oleh Filipina di kawasan Asia Tenggara yang juga terdampak oleh tren meningkatnya perempuan dalam aksi kejahatan terorisme. Fokus penelitian melibatkan dampak gender dalam proses penyebaran ekstremisme kekerasan dan rekrutmen, serta peran gender dalam kelompok ekstremis yang semakin penting di masa pandemi karena dampak negatif yang dibawa oleh pandemi yang berkorelasi dengan penyebaran ekstremisme kekerasan dan rekrutmen di Asia Tenggara. Rekrutmen melalui media sosial selama COVID-19 dieksploitasi oleh kelompok-kelompok teroris. Hal ini artinya kelompok-kelompok teroris mengancam keamanan individu secara langsung sehingga, respon yang tepat terhadap eksploitasi

Steven Andrew Washita, 2025

KERJA SAMA BADAN PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) DAN UNITED NATIONS (UN) WOMEN DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN EKSTREMISME KEKERASAN DI INDONESIA 2018-2024

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

ini adalah dengan melibatkan laki-laki dan perempuan di dalam upaya pencegahan penyebaran ekstremisme kekerasan di level lokal.

Evaluasi RAN PE tahap pertama berfokus pada pengukuran dampak dan efektivitas implementasi dari tahun pertama hingga akhir fase pertama pada 2024. Evaluasi ini menjadi bukti nyata dari kritik terhadap keamanan manusia melalui kompleksitas kerangka hasil dari RAN PE. Dengan banyaknya indikator dan melibatkan sekitar 48 kementerian, pengumpulan data menjadi sulit. Dari pihak UN Women dengan keahlian tentang gendernya juga mencatat adanya keterbatasan pemahaman tentang pengarusutamaan gender dalam organisasi pemerintah. Seringkali, "pengarusutamaan gender" hanya diartikan sebagai keterlibatan perempuan tanpa adanya partisipasi yang bermakna di semua tingkatan implementasi.

Baik BNPT atau UN Women sama-sama berniat melanjutkan kerja sama dengan fokus yang lebih kuat pada tingkat lokal di fase RAN PE selanjutnya 2025-2029. Kedua pihak berkomitmen untuk mempertahankan kolaborasi yang sudah terjalin meski ada kemungkinan perubahan kepemimpinan atau struktur pemerintahan di masa mendatang. Mereka berharap dapat terus memperjuangkan pengarusutamaan gender di semua tingkat kebijakan dalam konteks pencegahan ekstremisme kekerasan. Adanya dukungan yang berkelanjutan dan keterbukaan dari pihak BNPT terhadap isu gender menunjukkan komitmen jangka panjang dalam memperkuat kolaborasi ini.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan rujukan bagi praktisi dalam memahami peran pemerintah dalam pengarusutamaan gender di P/CVE Indonesia. Penulis juga berharap relasi baik yang terjalin antara Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dan UN Women dapat terjaga. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia dalam konsep pengarusutamaan gender dalam pembuatan kebijakan.

Steven Andrew Washita, 2025

KERJA SAMA BADAN PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) DAN UNITED NATIONS (UN) WOMEN DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN EKSTREMISME KEKERASAN DI INDONESIA 2018-2024

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam hal ini, lembaga-lembaga pemerintah diharuskan untuk mengevaluasi kembali definisi yang digunakan dalam partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan di Indonesia.

5.2.2 Saran Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian perempuan dalam P/CVE Indonesia. Penulis berharap akan ada penelitian berikutnya yang membahas evaluasi RAN PE fase pertama setelah hasil konkrit dari kerja sama BNPT dan UN Women sudah tercipta. Selain itu, penulis juga berharap akan ada penelitian-penelitian yang membahas RAN PE baik fase kedua atau fase-fase selanjutnya. Terakhir, penulis juga berharap akan ada penelitian yang membahas P/CVE yang melibatkan KPPPA yang di fokuskan pada anak-anak di Indonesia mengingat sifat kejahatan terorisme yang terus berevolusi.